

INSPIRASI

MENAKAR URGENSI BERAGAMA SEBAGAI
NALURIAH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Achmad Fauzi

MEMILIH PEMIMPIN PEREMPUAN
MENGGUGAT TAFSIR BIAS GENDER
SEBAGAI REFLEKSI KISAH RATU BALQIS

Asep Kurniawan

BISNIS PENDIDIKAN : KECENDERUNGAN
DAN TANTANGAN BARU BAGI PERGURUAN
TINGGI ISLAM

Yayat Suryatna

HUBUNGAN AGAMA DENGAN FILSAFAT
MENURUT IBNU RUSYD

Edy Chandra

MU'TAZILAH

(Sejarah Tumbuhnya, Tokoh dan Pemikirannya Doktrin:
"Ushul al Khamsah" Mihnah dan Pasca Mihnah)

H. Munir Subarman

RU'YATULLAH

Dalam Perspektif Pemikiran Ibnu Rusyd

Nursyamsudin

JIHAD DALAM AL-QUR'AN

(Suatu Pendekatan Tafsir Ahkam)

Samsudin

PEMIKIRAN TEOLOGI AL-BAQILLANI

(Sebagai Teolog Sunni dan bebarapa perbedaannya dengan
Al-Asy'ari)

Bisri

SUSUNAN REDAKSI

JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN

INSPIRASI

Vol.4 No.1 Juni 2006

Pelindung:

H. M. Imron Abdullah

Pengarah:

Maksum Muchtar

Penanggung Jawab:

H. Khaerul Wahidin

Tim Ahli:

H. Maksum

H. Abdullah Ali

Ahmad Asmuni

Dedi Djunaedi

Pemimpin Redaksi:

Abdul Latif

Redaktur Pelaksana:

Yayat Suryatna

Dewan Redaksi:

Endang Sujana

Suklani

Idham Kholid

Abdul Basit

Jalaludin

Ahmad Fauzi

M. Fuad Anwar

Siti Fatimah

Staf Redaksi:

Ahmad Rofii

Arief Rachman

Siti Azizah

Sirkulasi dan Ketatausahaan:

Zuardi Bahar

Muzaki

Umayah

Dedeh Nur Hamidah

Diterbitkan Oleh:

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon

Alamat Redaksi:

STAIN Cirebon Jl. Perjuangan Cirebon, 45132

Telp. 0231-481264

Alamat e-mail:

dafo@stain-cirebon.ac.id

DAFTAR ISI

JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN

INSPIRASI

Vol.4 No.1 Juni 2006

	Susunan Redaksi	i
	Salam Redaksi	ii
	Daftar Isi	iii
<i>Achmad Fauzi</i>	MENAKAR URGENSI BERAGAMA SEBAGAI NALURIAH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	977
<i>Asep Kurniawan</i>	MEMILIH PEMIMPIN PEREMPUAN MENGGUGAT TAFSIR BIAS GENDER SEBAGAI REFLEKSI KISAH RATU BALQIS.....	991
<i>Yayat Suryatna</i>	BISNIS PENDIDIKAN : KECENDERUNGAN DAN TANTANGAN BARU BAGI PERGURUAN TINGGI ISLAM.....	1002
<i>Edy Chandra</i>	HUBUNGAN AGAMA DENGAN FILSAFAT MENURUT IBNU RUSYD.....	1015
<i>H. Munir Subarman</i>	MU'TAZILAH (Sejarah Tumbuhnya, Tokoh dan Pemikirannya Doktrin: "Ushul al Khamsah" Mihnah dan Pasca Mihnah).....	1025
<i>Nursyamsudin</i>	RU'YATULLAH Dalam Perspektif Pemikiran Ibnu Rusyd.....	1041
<i>Samsudin</i>	JIHAD DALAM AL-QUR'AN (Suatu Pendekatan Tafsir Ahkam).....	1049
<i>Bisri</i>	PEMIKIRAN TEOLOGI AL-BAQILLANI (Sebagai Teolog Sunni dan bebarapa perbedaannya dengan Al-Asy'ari).....	1059

BISNIS PENDIDIKAN : KECENDERONGAN DAN TANTANGAN BARU BAGI PERGURUAN TINGGI ISLAM

Oleh : Yayat Suryatna

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon

Abstrak

Dalam penyelenggaraan pendidikan di negara kita, berbagai kontroversi bermunculan, misalnya di satu sisi pemerintah berharap secara kuantitatif rakyat Indonesia menjadi masyarakat terdidik, tapi di sisi lain, biaya pendidikan, terutama pendidikan tinggi terlalu mahal jika diukur dengan kemampuan ekonomi mayoritas rakyat Indonesia. Dalam aspek kualitatif, pemerintah berharap mutu pendidikan dari waktu ke waktu meningkat, tetapi di sisi lain pengendalian dan pengawasan mutu tidak jelas. Penawaran berbagai program pendidikan yang penyelenggaraannya secara akademis sulit dipertanggungjawabkan, jual beli nilai, skripsi, bahkan jual beli ijazah masih bermunculan di berbagai belahan bumi Indonesia. Ironisnya, hal-hal kontroversial semacam itu hingga saat ini masih tetap berjalan. Lembaga pendidikan yang seharusnya membawa misi membangun karakter dan mencerdaskan kehidupan bangsa seakan telah berubah menjadi lahan bisnis. Berhadapan dengan realitas tersebut, pemerintah seperti tidak berdaya mengatasinya atau mungkin menutup mata. Fenomena seperti ini sangat memprihatinkan, bahkan berbahaya dan tidak boleh dibiarkan. Berhadapan dengan realitas seperti ini, bagaimanakah seharusnya perguruan tinggi Islam berperan?

A. PENDAHULUAN

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu, untuk memebentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Dua paragraf di atas adalah alinea 3 dan 4 dari Pembukaan Undang Undang

Dasar 1945. Dua paragraf ini merupakan ekspresi dari tujuan luhur para pendiri bangsa dalam memerdekakan Indonesia. Salah satu keinginan luhur tersebut adalah “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”.

Kalimat ini mengandung makna pedagogis, sebab “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” tidak bisa dengan sendirinya, tetapi harus melalui proses, yakni pendidikan. Untuk Indonesia, amat disayangkan, upaya mencerdaskan dan membebaskan bangsa Indonesia dari kebodohan dan keterbelakangan penyebab utamanya adalah penja-jahan Belanda kurang lebih 350 tahun seringkali diiringi dengan hal-hal yang antara yang diinginkan dengan kenyataan tidak relevan, bahkan kontroversi.

Berbagai hal kontroversi dimaksud antara lain, di satu sisi pemerintah berharap secara kuantitatif rakyat Indonesia menjadi masyarakat terdidik, tapi di sisi lain, biaya pendidikan, terutama pendidikan tinggi terlalu mahal jika diukur dengan kemampuan ekonomi mayoritas rakyat Indonesia. Dalam aspek mutu, pemerintah berharap mutu pendidikan dari waktu ke waktu meningkat, tetapi di sisi lain pengendalian dan pengawasan mutu tidak jelas. Contoh, menjamurnya program magister yang diselenggarakan di hotel-hotel yang secara akademis sulit dipertanggungjawabkan. Herannya program-program semacam itu hingga saat ini masih tetap berjalan. Pemerintah sepertinya menutup mata, padahal ada realitas bahwa pendidikan sudah cenderung dibisniskan. Inilah yang melatarbelakangi penulisan makalah ini.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas ada dua hal yang menjadi pokok ulasan dalam penulisan ini, yaitu: Sejauhmanakah kebenaran fenomena pendidikan telah dibisniskan? Dan Bagaimanakah peran perguruan tinggi Islam dalam menghadapi bisnis pendidikan?

Hal ini penting paling tidak untuk Mengetahui berdasarkan analisis tentang sejauh mana kebenaran fenomena pendidikan telah dibisniskan, juga Mendeskripsikan peran yang harus dimainkan perguruan tinggi dalam menghadapi bisnis pendidikan

B. GLOBALISASI, KRISIS DAN BISNIS PENDIDIKAN SERTA PERANAN PERGURUAN TINGGI ISLAM DALAM MENGHADAPINYA

1. Urgensi Pendidikan Bagi Perkembangan Sebuah Bangsa

Mengenai pentingnya pendidikan, dapat disimak pula pernyataan berikut: “Belajar: Harta Karun di Dalamnya”, itulah laporan Komisi Internasional Tentang Pendidikan untuk Abad XXI yang diketuai oleh Jacques Delors, dan diterbitkan oleh UNESCO di tahun 1996.²

Pernyataan Delors tentang urgensi belajar, dalam kapasitasnya sebagai ketua Komisi Internasional UNESCO tentang Pendidikan untuk Abad XXI, implisit menggambarkan betapa pendidikan itu penting dan sangat berharga. Mengenai pentingnya belajar/pendidikan, sesungguhnya hampir semua orang tau, tetapi

implementasinya di tiap bangsa dan negara amat beragam.

UUD 1945, BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 Ayat 3 menyatakan : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

Undang Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu inti dari Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal senada juga tampak pada

pernyataan APNIEVE (2000 : 20) *AsiaPasific Network for International Education and Values Education* (Jaringan Asia Pasifik untuk Pendidikan Internasional dan Pendidikan Nilai-nilai), dalam buku yang diterbitkannya, *Learning to Live Together in Peace and Harmony*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh W.P Napitupulu dengan judul, *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni*, mengatakan, ada empat sendi pendidikan yaitu :

- a. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), yakni memperoleh instrumen-instrumen pengertian;
- b. *Learning to do* (belajar berbuat), sehingga seseorang mampu bertindak secara kreatif di lingkungannya;
- c. *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama), sehingga dapat berperan serta dalam dan bekerjasama dengan orang-orang lain dalam semua kegiatan manusia; dan
- d. *Learning to be* (belajar menjadi seseorang), sehingga mampu mengembangkan kepribadiannya lebih baik dan bertindak dengan otonomi, keputusan dan tanggung jawab pribadi yang lebih besar.³

Antara UUD 1945, UU Sisdiknas dengan sendi-sendi pendidikan yang disampaikan APNIEVE tampaknya memiliki beberapa kesamaan, di antara nya adalah sama-sama menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya mengembangkan kepribadian ke arah yang lebih baik.

2. Globalisasi dan Krisis Pendidikan

David Landes dalam makalahnya berjudul *Culture Make Almost All the Difference*, yang dimuat dalam buku, *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, di awal tulisannya ia mengatakan : Max Weber benar. Jika kita mempelajari segala hal yang berkaitan dengan sejarah perkembangan ekonomi, maka kita dapati bahwa budaya (*cultur*) lah yang menjadikan semua perbedaan perkembangan ekonomi itu. Faktanya adalah wirausahawan ekspatriat minoritas Orang-orang China di Timur dan Asia Tenggara, orang-orang India di Afrika Timur, Orang-orang Libanon di Afrika Barat, serta pemeluk Yahudi dan Calvinis hampir di seluruh Eropa, dan masih banyak yang lainnya.⁴

Menurut John Micklethwait dan Andrian Wooldridge, ada 10 ciri/atribut orang yang memiliki keberhasilan tinggi, di antaranya yaitu: keberanian mengambil resiko; kesungguhan menghadapi perubahan; bermurah hati; berusaha sekuat tenaga meningkatkan kesejahteraan; memiliki toleransi yang tinggi terhadap kegagalan; toleransi terhadap penghinaan.⁵

Pernyataan Landes di atas memang tidak secara langsung membahas pendidikan, tetapi masalah kebudayaan (*Culture*). Tapi setiap orang juga tahu bahwa antara pendidikan dengan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Budaya mempengaruhi pendidikan dan pendidikan mempengaruhi budaya. Dengan demikian, jika kita ingin membangun kebudayaan tinggi, maka sistem pendidikan pun harus dibenahi. Sebab hanya pendidikanlah yang bisa mengubah

kebudayaan suatu bangsa secara sistematis dan massal. Pendidikan merupakan agen perubahan dan akselerasi paling efektif untuk membangun sebuah budaya atau peradaban.

Satu dari sekian fungsi utama pendidikan adalah membantu manusia untuk mengambil kendali perkembangannya dirinya. Pendidikan haruslah memampukan semua manusia, untuk menentukan nasibnya sendiri sehingga mereka mampu menyumbang bagi kemajuan masyarakat di mana mereka hidup.⁶

Makalah Lourdes R. Quisumbing yang disajikan pada pertemuan Kelompok Pakar APNIEVE di Malaysia tahun 1996 (APNIEVE, 2000 :168) secara ringkas mengatakan : Di ambang pintu abad XXI ini, kita menjadi saksi pada pertumbuhannya kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di banyak bidang usaha manusia:ekonomi, sosial, budaya, politik, ilmiah dan teknologi.....

Namun sebaliknya, itu juga dapat diswbut zaman kegagalan! Walaupun kekayaan bangsa-bangsa sudah berlipat ganda tujuh kali dalam 50 tahun yang lalu, hanya sedikit dari kekayaan ini yang menetes ke bawah kepada mereka yang paling memerlukannya. Dalam kenyataannya, kebalikannya lah yang terjadi. Jika pernah terjadi bahwa orang-orang paling kaya menikmati 30 kali pendapatan mereka yang paling miskin, sekarang ini bagian mereka adalah 60 kali lebih besar. Ketidakadilan seperti itu merupakan suatu bentuk kekerasan yang mengarah pada kegelisahan dan percekocokan sipil (Patricia Mische, Berita Terobosan,GEA Musim Bunga/Musim

Panas 1995). Bukankah ini suatu tanda yang tidak dapat diragukan lagi dari suatu kegagalan, pada waktu sumber daya bumi dimanfaatkan dan dihabiskan untuk memenuhi ketamakan dan bukan kebutuhan manusia? Sesungguhnya hal itu suatu kegagalan tentang *NILAI-NILAI MANUSIA* yang paling mendasar tentang *KEAMANAN MANUSIA* dan *KELANGSUNGAN HIDUP*; tentang *PERDAMAIAN, KEADILAN* dan *KEMERDEKAAN*, tentang *CINTA KASIH* dan *KEHARUAN*.⁷

Namun untuk mewujudkan perubahan budaya melalui pendidikan tersebut banyak mengalami tantangan dan ketimpangan-ketimpangan. Philip H. Coombs, secara gamblang menguraikan ketimpangan-ketimpangan yang dialami dunia pendidikan, baik menurut urutan (kronologi) waktu kejadian, substansi permasalahan, maupun upaya-upaya pengembangan, khususnya upaya memperkecil kesenjangan praktik pendidikan hingga menjelang tahun 2000.

Secara garis besar, permasalahan, atau Philip Coombs menyebut krisis dalam dunia pendidikan pada dasarnya bersumber dari dua arah, yaitu dari sistem pendidikan itu sendiri, dan dorongan-dorongan dari luar (masyarakat), akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan politik serta sistem sosial yang ada.⁸

Berdasarkan pernyataan Coombs di atas, menunjukkan bahwa krisis pendidikan, bukan hanya persoalan di Indonesia saja tetapi masalah hampir di tiap negara. Krisis pendidikan menurut dia bisa berasal dari dalam sistem pendidikan sendiri, bisa juga dari luar, misalnya berasal dari masalah

sosial, ekonomi, teknologi atau politik.

Coombs lebih lanjut mengatakan,⁹ sejak tahun 1945, semua negara telah mengalami perubahan cepat dan fantastis, yang disebabkan oleh revolusi-revolusi besar dalam ilmu dan teknologi, dalam ekonomi dan politik, dalam struktur demografis dan sosial yang terjadi di dunia. Sistem pendidikan juga berkembang dan berubah secara cepat sari sebelumnya. Tetapi adaptasi pendidikan terhadap kejadian sekitarnya, yang berubah secara cepat sangatlah lambat, konsekuensi perbedaan antara sistem pendidikan dan lingkungan, yang dapat terwujud dalam berbagai cara, adalah inti dari krisis yang mendunia dalam pendidikan.

Di antara perbedaan-perbedaan yang mencakup di dalamnya adalah semakin renggangnya ketidaksesuaian antara isi kurikulum dalam kaitannya dengan kebutuhan riil siswa di lapangan. Yang lainnya adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Kemudian juga adalah ketidaksesuaian dan ketidakseimbangan yang terus berkembang antara pendidikan dengan (lapangan) pekerjaan, seperti halnya ketidaksesuaian antara beberapa kelompok sosial. Selain itu, juga terdapat permasalahan biaya pendidikan yang semakin besar dan kesediaan pemerintah untuk menganggarkan dan menginvestasikan dana di dalamnya.

Dalam memusatkan perhatian kepada penyebab dari hal-hal tersebut, laporan ini secara khusus meayentuh empat aspek : pertama, kenaikan yang tajam dari aspirasi-aspirasi pendidikan; kedua, kurangnya

sumber-sumber ilmu yang parah; ketiga, gaya inersia dari sistem pendidikan, “yang menyebabkan terlalu lambatnya respon sistem pendidikan terhadap kebutuhan riil dunia nyata, bahkan ketika sumber-sumber belum menjadi salah satu penghambat adaptasi”; dan keempat, gaya inersia dari masyarakat itu sendiri. “Sikap-sikap tradisional yang sudah mendarah daging, adat keagamaan, prestise dan pola insentif, serta struktur sosial yang menghalangi masyarakat untuk menggunakan manfaat pendidikan secara optimal dan untuk mendidik SDM untuk mendorong pertumbuhan bangsa.”

Lebih lanjut Cooms mengatakan,¹⁰ dalam Krisis ini, dalam sebutan apapun, tentulah sangat serius. Tujuan dari buku ini adalah untuk mencari titik terang dari krisis ini. Sekali halaman buku ini menunjukkan bukti yang disusun untuk laporan ini, maka akan menjadi jelas bagi para pembaca bahwa peringatan awal dari krisis dunia pendidikan pada laporan terdahulu bukanlah suatu alarm palsu. Tidak hanya karena krisis ini telah diintesifkan oleh adanya salah penyesuaian yang semakin besar antara sistem pendidikan dan perubahan dunia yang sangat cepat di sekelilingnya, tetapi juga bahwa krisis ini telah mencapai dimensi bare pada era 1970 dan 1980-an. Dari dimensi-dimensi baru ini, yang paling signifikan adalah adanya suatu krisis kepercayaan diri dalam dunia pendidikan itu sendiri.

Bagaimanapun, implikasinya janganlah secara otomatis didorong terlalu jauh dan dalam. Janganlah dianggap bahwa tidak ada sesuatupun yang melebihi kepuasan sebelum sistem pendidikan menjadi kedodoran akibat

pemakaian. Bukti-bukti yang ada tidaklah mendukung pada ramalan-ramalan semacam itu, lebih jauh lagi kami mempunyai tugas positif, sebagai masalah moral, untuk mengingatkan diri kami sendiri bahwa, dengan mengesampingkan halangan-halangan dan kekurangan-kekurangan yang ada, kemajuan pendidikan yang terjadi selama tiga dekade terakhir ini telah lebih besar dari perkiraan-perkiraan yang dibuat pada awal 1950-an.

Tujuan utamanya adalah untuk menangkap inti dari krisis dunia pendidikan dan mencari cara untuk menghadapi dan mengatasinya. Untuk tujuan tersebut, mungkin akan berguna untuk memberikan sedikit pandangan mengenai perubahan-perubahan besar yang muncul selama tiga dekade terakhir dalam lingkungan pendidikan.

Berkaitan dengan krisis pendidikan yang berasal dari luar, ada baiknya kita simak makalah Lourdes R. Quisumbing dengan judul Nilai-nilai Dalam Dunia Yang Berubah yang disajikan pada pertemuan Kelompok Pakar APNIEVE di Malaysia tahun 1996 (APNIEVE, 2000 :168) mengatakan : Di ambang pintu abad XXI ini, kita menjadi saksi pada pertumbuhan dan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di banyak bidang usaha manusia: ekonomi, sosial, budaya, politik, ilmiah dan teknologi..... Namun sebaliknya, itu juga dapat disebut zaman kegagalan!

Walaupun kekayaan bangsa-bangsa sudah berlipat ganda tujuh kali dalam 50 tahun yang lalu, hanya sedikit dari kekayaan ini yang menetes ke bawah kepada mereka

yang paling memerlukannya. Dalam kenyataannya, kebalikannyalah yang terjadi. Jika pernah terjadi bahwa orang-orang paling kaya menikmati 30 kali pendapatan mereka yang paling miskin, sekarang ini bagian mereka adalah 60 kali lebih besar. Ketidakadilan seperti itu merupakan suatu bentuk kekerasan yang mengarah pada kegelisahan dan percekocokan sipil (Patricia Mische, Berita Terobosan, GEA Musim Bunga/Musim Panas 1995). Bukankah ini suatu tanda yang tidak dapat diragukan lagi dari suatu kegagalan, pada waktu sumber daya bumi dimanfaatkan dan dihabiskan untuk memenuhi ketamakan dan bukan kebutuhan manusia? Sesungguhnya hal itu suatu kegagalan tentang NILAI-NILAI MANUSIA yang paling mendasar tentang KEAMANAN MANUSIA dan KELANGSUNGAN HIDUP; tentang PERDAMAIAN, KEADILAN dan KEMERDEKAAN, tentang CINTA KASIH dan KEHARUAN.¹¹

Pernyataan Louders di atas mengungkapkan bahwa, perkembangan peradaban manusia dalam rentang 50 tahun terakhir ini diakui banyak kemajuan dalam hampir seluruh aspek kehidupan, terutama kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi kemajuan yang tidak adil. Kemajuan yang semakin memperlebar gap antara kaya dan miskin lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu. Hal ini tentu berdampak buruk bagi pendidikan, termasuk krisis pendidikan di Indonesia.

Untuk penataan pendidikan di Indonesia ke depan tampaknya apa yang disampaikan Agustiar Sah Nur perlu untuk

disimak. mengatakan, ada tiga faktor utama yang sangat mempengaruhi pendidikan masa depan: pola pertumbuhan penduduk, pola pemanfaatan sumber daya alam, dan inovasi teknologi.¹²

3. Bisnis Pendidikan

Menurut Ron Ashkenas, at all, memenangkan globalisasi tidak cukup dengan melakukan globalisasi dalam makna geografis dan spasial saja. Banyak hal yang perlu dikedepankan, salah satunya adalah harus menjadi seorang pembelajar yang menuju pada penginisiatif global, dan dari penginisiatif global menuju menjadi pemimpin global. Untuk menjadi pembelajar menuju penginisiatif global ada 3 aspek yang harus dipersiapkan, yaitu pelatihan sumber daya manusia (SDM); pengembangan struktur organisasi; dan sistem proses-proses organisasi. Tercakup dalam pelatihan SDM yaitu training bahasa dan sensitivitas budaya, standarisasi form dan prosedur, menset up keberadaan di luar negeri melalui *joint venture*, dan mengontrak orang dalam hubungan kerja yang lintas batas¹³

Dimaksudkan dengan bisnis pendidikan dalam makalah ini adalah pengelolaan pendidikan yang didasarkan kepada tujuan mencari untung materi semata atau lebih mengedepankan motif ekonomi dibandingkan dengan motif pendidikannya. Bisnis pendidikan jika menggunakan istilah Cooms adalah sebuah bentuk krisis pendidikan. Karena sebagai sebuah krisis, maka krisis pendidikan bisa disebabkan oleh sistem pendidikan itu sendiri atau disebabkan oleh masalah yang berasal dari luar.

Aktivitas yang berindikasi bisnis pendidikan yang terjadi di Indonesia, mengambil beragam bentuk. Misal maraknya pendidikan yang pelaksanaannya baik ditinjau dari sisi waktu maupun fasilitas yang disediakan kurang masuk akal dan tidak memenuhi standar akademis. Kuliah satu minggu sekali di hotel, kampus induknya tidak jelas, perpustakaan entah dimana, perkuliahan hanya beberapa bulan saja, langsung mendapat gelar. Contoh lainnya, buku pegangan siswa yang selalu ganti setiap tahun, bahkan setiap semester, menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan dan kursus-kursus yang tidak mendapatkan ijin operasional dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama, dan berbagai bentuk bisnis pendidikan lainnya.

Beragam jenis bisnis pendidikan ini, disebabkan oleh beraneka ragam latar belakang atau motif. Sebagaimana dikatakan Philip H. Coombs¹⁴, bahwa, krisis dunia pendidikan, meskipun berbeda-beda tingkat keparahan dan keragamannya dari satu tempat dan waktu ke tempat dan waktu yang lainnya, disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor yang hampir sama di semua negara: "garis besar dari semua permasalahan tersebut di semua negara adalah hampir sama, apakah negara itu miskin atau kaya, negara baru atau negara 'lama', semuanya tidak akan menjamin negara tersebut mengalami krisis atau tidak." Hubungan antara tiga kata *perubahan*, *adaptasi*, dan *kesenjangan* adalah dasar dari semua krisis.

Perubahan disebabkan oleh revolusi-revolusi besar di bidang iptek; ekonomi dan politik, serta struktur demografis dan sosial.

Kesenjangan terjadi antara sistem pendidikan dengan lingkungannya. Sistem pendidikan tidak mampu mengimbangi dinamika kehidupan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi pendidikan terhadap kejadian di sekitarnya amat lambat.

Penyelenggaraan program pendidikan seperti contoh di atas pun, bisa disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana dikatakan Cooms yakni; revolusi-revolusi besar di bidang iptek; ekonomi dan politik, serta struktur demografis dan sosial. Misalnya kebutuhan prestise atau harga diri. Di negeri kita, gelar akademik bukan hanya simbol keilmuan, tetapi juga merupakan simbol status sosial. Semakin tinggi gelar akademik yang disandang seseorang, semakin tinggi pula status sosialnya dalam pandangan masyarakat kita.

Selain sebagai simbol status sosial, ijazah juga merupakan syarat utama rekrutmen pegawai, dasar penggolongan status kepegawaian, dan lain-lain. Semakin tinggi gelar akademik seseorang, peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar. Akibatnya perlombaan untuk memperoleh ijazah (bukan ilmu), makin kuat. Cara memperolehnya bisa lewat pendidikan yang benar sesuai aturan, membeli, memalsukan, atau dengan kuliah asal-asalan dengan membayar mahal. Intinya bahwa untuk mendapatkan ijazah banyak cara dilakukan bangsa Indonesia sekalipun harus membeli, pendidikan menjadi semacam lembaga bisnis, asal ada uang ijazah bisa didapat. Hal ini diperparah oleh moralitas bangsa Indonesia yang sangat tidak tahan digoda uang, di samping karena gaji tenaga kependidikan

tidak manusiawi.

Sungguh ironi apa yang terjadi di Indonesia dengan kecenderungan global. Kecenderungan pemimpin abad XXI sebagaimana dikemukakan John Naisbitt adalah yang mendukung kewirausahaan, kontribusi individual untuk memudahkan pemilihan apa yang tetap lokal dan apa yang akan menjadi global, apa yang akan tetap kesukuan dan apa yang akan menjadi universal. Dengan berakhirnya komunisme, runtuhnya negara-bangsa, berkembangnya ekonomi dunia pasar tunggal, tersebarnya demokrasi ke seluruh dunia dan revolusi baru dalam telekomunikasi, peluang, kemungkinan bagi individu, bangsa, keluarga, perusahaan dan lembaga, jauh lebih besar dari pada yang pernah dialami dalam masa hidup kita masing-masing¹⁵.

Cooms lebih lanjut mengatakan bahwa, salah satu penyebab krisis pendidikan adalah gaji guru dan upah guru yang diterima tidak sebanding dengan biaya kehidupan. Mereka mengalami penurunan dalam penghasilan, yang berakibat pada penurunan kemampuan memenuhi berbagai biaya hidup, sehingga pada gilirannya kualitas pembelajaran menurun.

4. Peran Perguruan Tinggi Islam Dalam Menghadapi Munculnya Kecenderungan Praktek Bisnis Pendidikan

Menurut UNESCO, pendidikan tinggi hendaknya terus memainkan peranan di dalam menciptakan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan pada tingkat yang tertinggi. Dengan memperhatikan asas

kebersamaan dan keadilan, perguruan tinggi harus membuka seluas-luasnya akses pengetahuan dengan cara memberikan perlakuan yang sama kepada semua penduduk dan setiap kelompok sosial ekonomi, apapun pendidikan mereka sebelumnya. Universitas-universitas harus ada di depan (pelopor) dengan cara mencoba metoda-metoda baru untuk menjangkau kelompok-kelompok pelajar baru, melalui ketrampilan dan pengetahuan yang diperolehnya di luar sistem-sistem formal, dan menyebarkan melalui pelatihan-pelatihan guru dan para pe;atih guru tentang pendekatan-pendekatan baru dalam belajar¹⁶.

Sebagai sebuah organisasi, perguruan tinggi Islam seharusnya selalu siap melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam melakukan perubahan ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman. Diantara prinsip-prinsip tersebut, menurut Yayat Hayati, ada 4, salah satunya yaitu bahwa perubahan dan pengembangan harus terfokus pada pembentukan kemampuan berorganisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya: program yang disusun harus dimaksudkan untuk membuat organisasi lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan masa kini dan lingkungan yang diantisipasi

Seiring dengan kebijakan otonomi perguruan tinggi di era pemerintahan Presiden Habibie, simbol-simbol kekuasaan birokrasi kampus dihilangkan dengan penghapusan eselon (deeselonisasi), bagi pejabat kampus, termasuk di lingkungan perguruan tinggi Islam. Rektor yang

sebelumnya termasuk pejabat negara eselon I, dihilangkan, ia hanya sebagai dosen dengan tugas tambahan rektor. Otonomi perguruan tinggi, pada dasarnya memberikan kewenangan lebih banyak kepada perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi Islam dalam menyelenggarakan pendidikannya.

Dengan otonomi tersebut, perguruan tinggi (Islam) memiliki tanggungjawab penuh dalam menentukan kualitas lulusannya, termasuk dalam menghadapi munculnya kecenderungan praktek bisnis pendidikan.

Secara hukum, Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 21 ayat 6 menyatakan: gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dinyatakan tidak sah¹⁸.

Berdasarkan pasal 21 ayat 6 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sis Dik Nas, maka lembaga-lembaga pendidikan yang tidak sesuai dengan semangat pendidikan yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 apa lagi yang tidak mengikuti aturan-aturan penyelenggaraan perguruan tinggi, seharusnya sejak dini perguruan tinggi semacam itu ditutup. Gelar-gelar akademik yang diberikannya dinyatakan tidak sah, bahkan para penyelenggaranya dapat dihukum karena termasuk kategori melanggar UU.

Peran yang dapat dimainkan perguruan tinggi Islam (PTI) dalam menghadapi fenomena praktek bisnis pendidikan.

Pertama, menjadikan PTI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan jauh dari praktek-praktek akademik kotor sehingga menjadi contoh bagi perguruan tinggi non PTI. Hal-hal yang mengarah pada praktek bisnis pendidikan, dari mulai jual beli nilai, skripsi, ijazah dan sebagainya jangan sampai terjadi. Sebab, Perguruan Tinggi Islam, selain membawa misi akademik, juga membawa misi dakwah yakni *amar makruf nahi munkar* termasuk dalam pelaksanaan pendidikan.

Kedua, memberikan pencerahan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik tentang bahaya dari praktek bisnis pendidikan dalam semua jenjang.

Namun demikian, perguruan tinggi Islam bukan aparat penegak hukum sehingga kerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Tanpa dukungan aparat penegak hukum yang bersih dan jujur, praktek bisnis pendidikan akan sulit diberantas. Apa lagi masalah gelar di negeri kita, dipersepsi dan diakui secara real ibarat tiket masuk status sosial. Kesadaran masyarakat akan budaya hidup taat dan patuh pada aturan termasuk aturan dan prosedur yang harus ditempuh dalam dunia pendidikan, juga menjadi penting.

Ketiga, perguruan tinggi Islam juga selayaknya melakukan introspeksi dan pembenahan. Mungkin saja program pendidikan yang selama ini berjalan terlalu bertele-tele dan sarat dengan hal-hal yang tidak bersifat akademis, misalnya dari sisi waktu studi terlalu lama, beban mata kuliah (SKS) terlalu banyak, serta sistem

administrasi dan birokrasi yang membelenggu. Akibatnya mendorong lembaga pendidikan yang seolah-olah obral gelar muncul dan laku di masyarakat.

Keempat, pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi Islam harus ditingkatkan penghasilannya. Sebab bisa saja terjadi, praktek bisnis pendidikan dipicu oleh minimnya penghasilan tenaga pendidik dan kependidikan. Lebih-lebih ketika penghasilan yang minim tersebut harus dibagi pula oleh kewajiban melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat tuntutan profesinya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab di muka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktivitas yang berindikasi bisnis pendidikan yang terjadi di Indonesia memang ada, misal maraknya pendidikan setingkat S.2 oleh pihak lembaga pendidikan swasta tertentu yang pelaksanaannya baik ditinjau dari sisi waktu maupun fasilitas yang disediakan kurang masuk akal. Contoh lain, misalnya pergantian buku pegangan untuk siswa pada tingkat pendidikan dasar dan

menengah yang hampir tiap smester, padahal isi buku secara substansi sama, menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan dan kursus-kursus yang tidak mendapatkan ijin operasional dari departemen yang berwenang.

2. Peran yang dapat dimainkan perguruan tinggi Islam adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik tentang bahayanya penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan baik administratif maupun akademik serta terindikasi terjadi praktek bisnis pendidikan dalam pengelolaannya.
3. Di sisi lain, perguruan tinggi Islam juga seharusnya melakukan introspeksi kenapa bisnis pendidikan yang seolah-olah obral gelar terjadi dan laku di masyarakat. Mungkin saja program pendidikan di perguruan tinggi yang selama ini berjalan terlalu bertele-tele dan sarat oleh hal-hal yang tidak bersifat akademis, misalnya karena faktor administrasi dan birokrasi. Akibatnya dari sisi waktu menjadi lama dan dari segi biaya menjadi besar dan tidak efisien. Atau juga disebabkan oleh beban mata kuliah yang terlalu banyak.

End Note

¹UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 3.

²APNIEVE (Asia Pasific Network for International Education and Values Education - Jaringan Asia Pasifik untuk Pendidikan

Internasional dan Pendidikan Nilai-nilai), *Learning to Live Together in Peace and Harmony*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh W.P Napitupulu dengan judul, *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni*. Buku aslinya diterbitkan pertama kali tahun 1998 di Bangkok, sedangkan terjemahan ke dalam

bahasa Indonesia diterbitkan Oleh Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, pada tahun 2000, hal 20.

³APNIEVE, *Ibid*, hal 20.

⁴David Landes, dalam makalahnya berjudul, *Culture Make Almost All the Difference*, yang dimuat dalam buku, *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington (ed.), (New York, Basic Books, 2000), 2.

⁵John Micklethwait, Andrian Wooldridge, *A Future Perfect: The Challenge and Hidden Promise of Globalization*, New York: Crown Publishers, 2000), 85.

⁶UNESCO, *Learning The Treasure Within, Prancis: Universitaires de France Vendone*, 1996:82

⁷APNIEVE, *Ibid*, 168

⁸Philip H. Coombs, *The World Crisis In Education (The View from The Eighties)*, (New York: Oxford University Press, 1985), 10.

⁹Philip H. Coombs, *The World..209*.

¹⁰Philip H. Coombs, *The World..220*

¹¹APNIEVE, *op.cit*, 168

¹²Agustiar Syah Nur dalam buku, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, (Bandung : Lubuk Agung, 2001), 292.

¹³Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Tod Jick dan Steve Keer, *The Boundaryless Organization : Breaking The Chains of Organizational Structure* (San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 2002), 358.

¹⁴Philip H. Coombs, *The World Crisis In Education (The View from The Eighties)*, (New York: Oxford University Press, 1985), 201.

¹⁵John Naisbitt, *Global Paradox* (New York: Avon Books, 1995), 360

¹⁶UNESCO, *Learning The Treasure Within,, op cit* 156.

¹⁷Yayat Hayati Djatmiko, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Alfabeta CV, 2004), 106

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional, (Surabaya: Karina, 2004), 12.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

APNIEVE (Asia Pasific Network for International Education and Values Education -Jaringan Asia Pasifik untuk Pendidikan Internasional dan Pendidikan Nilai-nilai), *Learning to Live Together in Peace and Harmony*, penerjemah W.P Napatipulu dengan judul, *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2000.

Ashkenas, Ron, Dave Ulrich, Tod Jick dan Steve Keer, *The Boundaryless Organization : Breaking The Chains of Organizational Structure*, San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 2002.

Coombs, Philip H. *The World Crisis In Education (The View from The Eighties)*, New York: Oxford University Press, 1985.

- Djarmiko, Yayat Hayati, *Perilaku Organisasi*, Bandung:Alfabeta CV,2004.
- Landes, David, *Culture Make Almost All the Difference*, dalam *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington (ed.), New York: Basic Books, 2000.
- Neufeldt, Victoria and David B. Guralnik (ed.), *Webster's New College Dictionary, Third Edition*, New York : Mac Milan General Reference, 1996
- Micklethwait, John dan Andrian Wooldridge, *A Future Perfect: The Challenge and Hidden Promise of Globalization*, New York:Crown Publishers, 2000.
- Nur, Agustiar Syah, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, Bandung : Lubuk Agung, 2001
- Naisbitt, John, *Global Paradox*, New York:Avon Books,1995.
- Ohmae, Kenichi, *The Borderless World : Power and Strategy in The Interlinked Economy*, New York : Harper Collins Publisher,1995.
- UNESCO, *Learning The Treasure Within*, Prancis: Universitaires de France Vendone, 1996.
- Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional, Surabaya: Karina,2004
- UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Jakarta: Sinar Grafika,2002.

